



**SAMBUTAN KEPALA PERWAKILAN BPK RI
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PADA
ACARA PENYERAHAN PEMANTAUAN TLHP DAN LHP
SEMESTER II TAHUN 2010**

Yth. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat atau yang mewakili
Yth. Gubernur Kalimantan Barat atau yang mewakili
Yth. Para Ketua DPRD Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat atau yang mewakili
Yth. Para Bupati/Walikota se-Kalimantan Barat atau yang mewakili
Yth. Inspektur Provinsi dan Para Inspektur Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Barat
atau yang mewakili,
Yth. Para Pejabat Struktural BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat
Yth. Hadirin yang berbahagia

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Salam Sejahtera bagi Kita semua,

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmatNya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul pada acara Penyerahan Hasil Pementauan Pelaksanaan Tindak Lanjut atas Rekomendasi hasil Pemeriksaan BPK RI (TLHP) dan Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Semester II Tahun 2010 pada pagi hari ini. Penyerahan Hasil Pemantauan TLHP dan LHP BPK RI ini merupakan amanah Pasal 23 E ayat (2) UUD 1945, Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, dan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006. Dalam tataran teknis, acara pagi hari ini merupakan wujud dari kesepakatan bersama antara BPK RI dengan DPRD se-Kalimantan Barat. Selama tahun 2010, BPK RI sudah menandatangani kesepakatan bersama dengan 488 DPRD dari 524 DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota dari 32 Provinsi di Indonesia. Alhamdulillah BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat telah selesai

melaksanakan penandatanganan kesepakatan bersama dengan seluruh DPRD se Kalimantan Barat pada tahun 2010 lalu. Melalui kesepakatan bersama tersebut, BPK memberikan ruang yang seluas-luasnya kepada DPRD untuk berkonsultasi dengan BPK terkait tindak lanjut Hasil Pemeriksaan BPK.

Hadirin yang kami hormati,

Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 menyatakan bahwa tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI tersebut disampaikan oleh Pejabat kepada BPK RI selambat-lambatnya enam puluh hari setelah LHP diterima. BPK RI, selanjutnya, melakukan penelaahan terhadap dokumen tindak lanjut yang telah disampaikan untuk menentukan status tindak lanjut apakah telah sesuai, atau belum sesuai dengan rekomendasi. Hasil pemantauan atas tindak lanjut ini kemudian kami sampaikan kepada DPRD dan eksekutif di daerah. Mekanisme pemantauan tindak lanjut ini telah dituangkan dalam Peraturan BPK RI Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan. Selain peraturan tersebut, Menteri Dalam Negeri juga telah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2010 tentang pedoman pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK. Peraturan tersebut menjadi pedoman DPRD untuk mendorong efektivitas pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan kami. Peran sentral DPRD dalam hal ini menjadi semakin kuat. Oleh karena itu, koordinasi antara tiga pihak, yaitu BPK, DPRD, dan Eksekutif daerah, dalam meningkatkan tata kelola keuangan daerah sangat diperlukan. Kami sangat menghargai jerih payah para pejabat yang telah menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK dengan baik. Kami juga mengingatkan kepada para pejabat yang belum menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK agar segera menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK.

Hadirin yang kami hormati,

Dari tahun 2004 Sampai dengan semester dua tahun 2010, BPK telah melakukan pemantauan tindak lanjut terhadap lima belas entitas yang ada di Provinsi Kalimantan Barat. Selama kurun waktu tersebut, terdapat 2144 temuan dan 4313 rekomendasi. Dari 4313 rekomendasi yang telah diberikan BPK, sejumlah 2047

(47%) rekomendasi telah sesuai dengan tindak lanjut, sejumlah 1299 (30%) rekomendasi belum sesuai dengan tindak lanjut, dan sejumlah 967 (23%) rekomendasi belum ditindaklanjuti. Dari lima belas entitas yang ada di provinsi Kalimantan Barat, kami mencatat tiga pemerintah kabupaten/kota dengan prestasi baik dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK. Prestasi baik ini kami nilai dari keberhasilan menindaklanjuti hasil pemeriksaan sesuai dengan rekomendasi. Ketiga Pemerintah Daerah tersebut adalah Pemerintah Kabupaten Sambas (83%), Pemerintah Kabupaten Landak (74%), dan Pemerintah Kota Singkawang (73%). Untuk itu kami mengucapkan selamat kepada ketiga pemerintah tersebut. Semoga prestasi ini segera disusul oleh pemerintah kabupaten/kota yang lain.

Pada kesempatan yang mulia ini, kami juga telah menyerahkan LHP kinerja dan LHP dengan tujuan tertentu semester dua tahun 2010 pada enam entitas, yaitu Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Pemerintah Kota Pontianak, Pemerintah Kabupaten Sambas, Pemerintah Kabupaten Sanggau, Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, dan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara. Bagi Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/kota yang telah menerima LHP dari BPK, kami mengharapkan adanya rencana aksi nyata demi perbaikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik lagi di masa mendatang.

Hadirin yang berbahagia,

BPK menyadari bahwa upaya mendorong terwujudnya pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh BPK. Diperlukan sinergi antara BPK, DPRD dan Pemerintah daerah, tanpa harus mencampuri tugas dan fungsi masing-masing.

Sinergi yang dimaksud adalah pembentukan pusat data elektronik BPK yang merupakan gabungan antara data elektronik internal BPK (*e-BPK*) dan data elektronik yang dimiliki *auditee* (*e-auditee*) baik yang berupa data keuangan maupun data non keuangan. Pembentukan pusat data melalui strategi *link and match* tersebut dimaksudkan agar BPK dapat setiap saat melakukan pemeriksaan secara elektronik (*e-audit*) di tempat kedudukan kantor-kantor BPK. Hal ini selain akan mempermudah, menghemat dan mengefektifkan proses pemeriksaan, juga akan

memperluas cakupan pemeriksaan BPK dan mempercepat waktu penyusunan dan penyampaian hasil pemeriksaan kepada para pemangku kepentingan.

BPK mengharapkan melalui Sinergi tersebut akan memberikan manfaat yaitu: 1) mengurangi KKN secara sistemik; 2) mendukung optimalisasi penerimaan negara; 3) mendukung efisiensi dan efektifitas pengeluaran negara; 4) mengoptimalkan tindak lanjut temuan BPK; dan 5) mengoptimalkan pemeriksaan kinerja. Apabila inisiatif BPK Sinergi tersebut dapat direalisasikan maka optimalisasi pengelolaan keuangan negara akan lebih cepat terwujud.

Sejak 3 Juni 2010 hingga saat ini, sudah ada 39 entitas yang terdiri dari 6 lembaga negara, 15 kementerian, 4 BUMN, BI, LPS, dan PPATK yang telah menandatangani nota kesepahaman dengan BPK dalam kerangka pembentukan pusat data BPK. Direncanakan pada waktu dekat akan dilakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan kementerian dan lembaga yang lain. Gerakan BPK sinergi ini juga diharapkan akan bisa dilaksanakan antara BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat dengan seluruh pemerintah daerah se Kalimantan Barat.

Hadirin yang kami hormati,

Saat ini BPK memasuki masa persiapan untuk melakukan pemeriksaan keuangan di seluruh entitas di Kalbar. Pada akhir bulan ini, BPK akan melakukan pemeriksaan pendahuluan dalam rangka pemeriksaan keuangan atas laporan keuangan pemerintah daerah. Saat ini BPK telah menyiapkan langkah-langkah persiapan pemeriksaan. Langkah itu termasuk melakukan koordinasi dengan seluruh entitas di Kalimantan Barat. Hal yang perlu kami sampaikan kepada hadirin sekalian adalah, kapasitas kami saat ini sebanyak sepuluh tim pemeriksa. Oleh karena itu, apabila seluruh pemerintah daerah di Kalbar menyampaikan kepada kami draft laporan keuangan pemerintah daerah secara serentak, maka akan terdapat lima pemerintah daerah yang harus menunggu. Oleh karena itu, kami meminta kepada seluruh Kepala Daerah yang hadir di forum ini untuk segera menyampaikan informasi rencana penyerahan draft LKPD kepada kami. Dengan informasi itu, kami berharap dapat memetakan kapasitas pemerintah daerah dan kapasitas BPK tanpa

melanggar aturan tenggat waktu sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 17 tahun 2004 tentang Keuangan Negara.

Hadirin yang berbahagia,

Demikianlah sambutan yang dapat kami sampaikan pada acara Penyerahan Hasil Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut atas Rekomendasi hasil Pemeriksaan BPK RI (Pemantauan TLHP) dan Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Semester II Tahun 2010. Semoga pemantauan TLHP dan LHP Semester dua Tahun 2010 yang kami serahkan dapat bermanfaat bagi terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara/Daerah pada Pemerintah Daerah se-Kalimantan Barat. Atas perhatian hadirin, kami ucapkan terima kasih dan kami mohon maaf apabila terdapat hal-hal yang tidak berkenan di hati hadirin.

Wassalamu' alaikum warrahmatullahi Wabarakatuh

Kepala Perwakilan

TTD

Ir. Adi Sudiby, M.M.